

Demokrasi pluralistik: Tantangan dan integrasi nilai-nilai Islam dalam konteks Indonesia

Muhammad Ali Wafa

Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: aliassakhiy57@gmail.com

Kata Kunci:

demokrasi; Islam; egaliter; liberalisme; pluralisme

Keywords:

democracy; Islam; egalitarian; liberalism; pluralism

ABSTRAK

Demokrasi sering di definisikan sebagai persamaan hak manusia di depan hukum. Demokrasi mulai di kenal pada zaman Yunani tepatnya di kota Athena yang waktu itu di di kenal sebagai pusat keilmuan mendasarkan setiap pengambilan keputusannya pada mayoritas pemungutan suara. Dalam negara demokrasi, rakyat memegang kekuasaan dan menggunakannya untuk kemakmuran rakyat. Islam sudah mengenal sistem Demokrasi sejak zaman Rasul dan Khulafaur Rasyidin, walaupun umat Islam menganut sistem pemerintahan

monarki setelah masa Khulafaur Rasyidin, hal ini tidak dapat di gunakan untuk membuktikan bahwa Islam bukan agama yang demokratis. Penulis berusaha untuk menuliskan prinsip Islam yang sejalan dengan sistem demokrasi seperti Egaliter (al-musawah), Liberalism (al-hurriyyah) dan Pluralism (al-musyarakat). Selain itu, Penulis juga berusaha menguraikan perkembangan dan tantangan demokrasi sepanjang sejarah, mulai dari zaman Yunani Kuno hingga penerapannya di Indonesia.

ABSTRACT

Democracy is often defined as equality of human rights before the law. Democracy began to be known in the Greek era, specifically in the city of Athens, which at that time was known as a scientific center that based every decision made on the majority of votes. In a democratic country, the people hold power and use it for the prosperity of the people. Islam has known the democratic system since the time of the Prophet. and Khulafaur Rasyidin, even though Muslims adopted a monarchical system of government after the time of Khulafaur Rasyidin, this cannot be used to prove that Islam is not a democratic religion. The author tries to write down Islamic principles that are in line with democratic systems such as Egalitarian (al-musawah), Liberalism (al-hurriyyah) and pluralism (al-musyarakat). Apart from that, the author also tries to describe the development and challenges of democracy throughout history, starting from Ancient Greece to its implementation in Indonesia.

Pendahuluan

Wacana terkait demokrasi terus bergulir sejalan dengan semakin majunya perkembangan zaman, demokrasi seakan menjadi suatu konsep yang menjadi penyelamat begi ketidak berdayaan rakyat di depan pemerintahan yang mengedepankan totaliter dan kediktatoran. Demokrasi meruoakan simbol dari sebuah sistem pemerintahan yang mana para ahli sering mengartikan bahwa demokrasi adalah persamaan hak hak sesame manusia, sebuah sistem yang berpandangan bahwa semua



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

manusia sama di depan hukum, maka dari hal ini muncullah beberapa idiom seperti egalite (persamaan), equality (keadilan), dan lain sebagainya.

Sistem demokrasi berasal dari Yunani dan dikembangkan di dunia barat tepatnya di kota Athena yang pada masa itu kerap dianggap sebagai pusat keilmuan (Kurniawan, 2016), sistem pemerintahan di Athena didasarkan pada mayoritas pemungutan suara, jadi setiap pengambilan Keputusan selalu didasarkan pada Keputusan yang diambil melalui pemungutan suara, namun sayangnya sistem demokrasi mulai terkubur sejalan dengan peradaban Yunani yang mulai surut dan kehilangan pesonanya.

Setelah punahnya Yunani, bangsa yang berbudaya tinggi adalah bangsa Romawi yang dapat dikatakan bahwa keilmuannya masih berpegangan pada karya bangsa Yunani seperti Aristoteles dan lain sebagainya, setelah bangsa Romawi runtuh dan Katolik Roma mulai berkembang, bangsa Eropa masuk dalam suatu masa yang disebut dengan abad kegelapan dikarenakan otoritas agama yang tidak memberikan kebebasan penganutnya untuk belajar.

Munculnya Gerakan Renaissance dan Aufklarung pada abad ke 15 dan 18 memberikan nafas baru dalam Sejarah demokrasi di Eropa dan buku-buku peninggalan bangsa Yunani mulai mendapatkan perhatian serius di Eropa (Zainuddin, 2016). Dengan datangnya bangsa Eropa ke Nusantara dalam rangka membentuk koloni dan beberapa mahasiswa yang belajar ke Eropa seperti Bung Hatta dan tokoh-tokoh lain, mereka berkenalan dengan ide-ide demokrasi yang menurut mereka bisa diterapkan di tanah kelahiran mereka sehingga bisa mewujudkan kebebasan yang sebelumnya dibatasi oleh para penjajah.

Pembahasan

Pengertian Demokrasi

Di tinjau dari segi Etimologi, demokrasi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *demos* yang memiliki arti rakyat dan *kratos* yang memiliki arti kekuasaan atau kedaulatan, sedangkan secara terminologi, banyak definisi yang diberikan oleh para ahli, seperti yang disebutkan oleh Hamidah dalam (Zainuddin, 2022).

Menurut Joseph A. Schumpeter, demokrasi adalah sebuah rencana institusional yang bertujuan untuk mencapai Keputusan dimana seseorang memiliki otoritas untuk memilih cara bersaing atas suara rakyat. Sidney Hook dalam *Encyclopedia Americana* mengartikan demokrasi sebagai sistem pemerintahan dimana semua Keputusan yang dibuat oleh pemerintah baik secara langsung atau secara tidak langsung harus didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas oleh rakyat dewasa.

Abraham Lincoln memberikan pendapat bahwa Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat dan untuk kemakmuran rakyat, Charles Costello berpendapat bahwa Demokrasi adalah struktur sosial dan politik yang dimana otoritas pemerintah dibatasi hukum dan budaya, hak-hak dasar warga negara dilindungi.

Menurut Abdurrahman Wahid, Dalam demokrasi ada dua prinsip utama yaitu nilai pokok dan nilai derivasi,, nilai pokok demokrasi adalah persamaan, kebebasan dalam aspek apapun, musyawarah dalam memutuskan perkara serta keadilan bagi setiap warga negara. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah aktivis pro demokrasi yang ingin melaksanakan demokrasi dengan sebaik baiknya, Pemikirannya yang demokratis membuatnya memiliki prinsip pentingnya berdialog dan mau mendengarkan aspirasi dari pihak lawan.

Nurcholish Majid mengatakan seperti yang di kutip oleh Nasaruddin mengatakan bahwa sebuah negara dapat di katakan negara demokratis apabila di ukur dengan sejauh mana jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) di lakukan di negara tersebut, seperti kebebasan menyatakan pendapat, hak berserikat dan lain sebagainya.

Demokrasi di nilai begitu penting karena memastikan rakyat terlibat dalam pengampilan Keputusan politik. Dalam sistem demokrasi, setiap warga negara harus memberikan suara dan berpartisipasi dalam menentukan garis besar dan kebijakan pemerintah, selain itu, demokrasi juga mendorong pengawasan yang di lakukan public kepada pemerintah.

Demokrasi memiliki beberapa karakteristik antara lain

1. Keterlibatan Rakyat: demokrasi melibatkan partisipasi rakyat dalam beberapa kesempatan seperti Ketika pemilu, Masyarakat memiliki hak yang sama sesuai dengan undang undang yang berlaku untuk memberikan hak suaranya.
2. Kebebasan berpendapat: demokrasi memberikan kebebasan dalam berpendapat dan dalam mengemukakan ekspresi untuk warga negara, setiap warga negara memiliki hak untuk menyuarakan keinginan mereka kepada dewan yang di percaya yang di anggap sebagai wakil rakyat agar disampaikan kepada pemerintah.
3. Pemilihan Umum: pemilihan umum di gunakan untuk memilih anggota dewan baik eksekutif maupun legislatif di negara negara yang menggunakan sistem demokrasi.
4. Perlindungan Hak Asasi Manusia: demokrasi melindungi hak hak dasar seperti kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi dan lain sebagainya bagi setiap warga negara.
5. Kekuasaan Terbatas dan Terbagi: demokrasi membagi kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaannya, seperti Lembaga eksekutif, Yudikatif dan Legislatif yang memiliki otoritas yang berbeda.
6. Pengawasan Publik: demokrasi mendorong agar publik turut mengawasi serta mengawal setiap kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah melalui beberapa aspek seperti mekanisme transparansi, media yang independen dan lain sebagainya.
7. Hakim dan hukum yang independent: demokrasi menekankan bahwa hukum harus independent dan netral untuk memastikan bahwa semua warga negara bernilai sama di mata hukum.
8. Penghormatan terhadap minoritas: demokrasi sangat menghormati hak hak minoritas dengan memastikan bahwa aspirasi dan pendapat minoritas di dengar oleh Masyarakat umum dan di masukkan dalam proses pengambilan Keputusan oleh pemerintah (Alifa, 2023).

Islam dan demokrasi

Realitas Sejarah mencatat banyak sistem yang berlaku dalam pengangkatan khalifah atau pemimpin negara. Pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah pada tahun 632 M yang di pilih melalui forum musyawarah (*majlis syura*) di Saqifah Bani Sa'idah menunjukkan adanya sistem demokrasi pada masa itu, Khalifah Umar bin Khattab sebagai pengganti dari Khalifah Abu Bakar juga di pilih berdasarkan kesepakatan para sahabat Ketika itu, Kemudian pemilihan Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga di lakukan dengan pembentukan *ahlul halli wal aqdi* semacam tim formatur dengan 6 anggota seperti yang di wasiatkan oleh Khalifah Umar, 6 orang itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqash, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, dan Abdullah.

Dua belas tahun kemudian, Ali bin Abi Thalib di baiat oleh mayoritas umat muslim pada masa itu, dan yang pertama kali membaiat adalah Thalhah kemudian di ikuti dengan Zubair dan jamaah muslimin lainnya (Ni'mah, 2023).

Sejarah juga mencatat bahwa dalam pemerintahan Islam juga beberapa kali menganut sistem otoriter seperti pada masa pemerintahan Bani Umayyah (661-750 M) dan Bani Abbasiyah (750-1258 M) dan sistem pemerintahan monarki lainnya, pada masa ini dewan syura tetap ada namun tidak memiliki wewenang untuk mengangkat dan menurunkan khalifah pada masa itu, kendati demikian tidak menjadikan alasan yang melegitimasi bahwa Islam bukan agama yang demokratis di karenakan sebelumnya juga terdapat sistem pemerintahan yang demokratis.

Banyak ayat ayat alquran yang berbicara mengenai prinsip prinsip demokrasi seperti surah *Al Syura* ayat 38 yang menjelaskan bahwa Allah memuji orang orang Anshar yang sebelum datangnya Nabi bermusyawarah dalam memutuskan suatu perkara, Nabi juga senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat setiap memutuskan suatu perkara, baik itu perkara mengenai siasat pertempuran maupun urusan pemerintahan selain hukum - hukum yang di tetapkan oleh Allah SWT (Ujaili, 2018).

Dalam teori Masykuri Abdillah tentang prinsip dan asas demokrasi di sebutkan bahwa dalam demokrasi terdapat nilai nilai normatif seperti egaliter (*al-musawah*), Liberalism (*al hurriyyah*) dan pluralism (*al-musyarakat*) (Alifa, 2023).

1. Egaliter (*al-musawah*)

Munculnya Prinsip egaliter ini bertujuan untuk menentang sistem kekuasaan yang di dominasi oleh kaum oligarki serta melawan hierarki dan diskriminasi. Dalam dunia modern, prinsip persamaan adalah kesamaan dalam kesempatan (*equality of opportunity*).

Dalam Islam prinsip persamaan ini merujuk pada QS. *Al-Hujurat* (49) ayat 13 yang menjelaskan mengenai penciptaan manusia secara gamblang, yaitu dari pasangan laki laki dan Perempuan yakni Adam dan Hawa yang dari pasangan tersebut lahirlah pasangan pasangan lainnya yang kemudian membentuk sebuah komunitas dan membentuk sebuah kekeluargaan, Imam Fakhrul Addin Ar Razi mengatakan bahwa ayat ini mengisyaratkan agar manusia tidak saling menyombongkan diri antara satu dengan lainnya di karenakan hakikatnya terlahir dari ayah dan ibu yang sama (Razi, 1981)

2. Liberalism (*al-hurriyyah*)

Kebebasan adalah salah satu komponen untuk mewujudkan demokrasi, kebebasan ini mencakup beberapa aspek kebebasan seperti kebebasan berpendapat, kebebasan memilih pemimpin tanpa adanya paksaan, kebebasan beragama dan lain sebagainya, sebuah negara demokratis harus memberikan kebebasan penuh kepada warganya.

Salah satu aspek kebebasan paling fundamental adalah kebebasan beragama dalam urusan social – politik, dalam negara demokratis, warga negara harus di berikan kebebasan penuh untuk memilih agamanya, begitu pula dalam Islam, Islam tidak pernah memberikan paksaan dalam beragama, seperti dalam Al Quran surah Al Baqarah (2) ayat 256 yang memberikan penjelasan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama, Rasulullah mengajarkan kepada setiap pemimpin pasukan agar tidak serta merta memerangi suatu kaum sampai menawarkan tiga penawaran, *yang pertama*, masuk Islam, *yang kedua* membayar Jizyah, dan yang ketiga berperang, juga dalam piagam Madinah, Rasulullah memberi kebebasan bagi umat agama lain agar beribadah sesuai dengan ajaran agama mereka selama mereka tidak melanggar poin poin perjanjian yang telah di sepakati sebelumnya.

3. Pluralism (*al-musyarakat*)

Pluralisme toleransi keberagaman baik kelompok etnis maupun agama dalam suatu negara, Pluralism merujuk pada negara bermasyarakat plural yang kebanyakan terdiri dari berbagai macam etnsi, agama dan budaya sehingga kerap kali berpotensi menimbulkan konflik.

Dalam Islam, adanya perbedaan di antara manusia sudah menjadi *Sunnatullah* (hukum alam) yang tidak bisa di rubah maupun di tolak. Seperti dalam surah al hujurat (49) ayat 13 yang menjelaskan tentang penciptaan manusia dengan bangsa dan suku yang berbeda, maka dari itu pluralism harus di terima dan di hargai sebagai kenyataan. Dalam negara demokratis prinsip pluralism harus di terapkan sehingga dapat menghindari konflik baik antar etnis atau budaya.

Dinamika Demokrasi di Indonesia

Setelah Jepang kalah dalam perang dunia kedua, Indonesia mengumumkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, suatu negara yang baru lahir dengan sistem demokrasi yang telah lama di idam idamkan kini mendapat jalannya, sejak awal Indonesia membuka diri terhadap demokrasi, tidak ada penolakan penolakan terhadap dasar negara oleh para tokoh etnis, agama dan budaya pada masa itu.

Demokrasi yang pertama kali di terapkan di Indonesia pada waktu itu adalah Demokrasi Parleментар yang berjalan dengan terseok seok di karenakan Belanda masih gencar gencarnya melakukan agresi guna dapat menguasai Indonesia Kembali. Undang Undang Dasar 1945 juga di nilai tidak memadai untuk sebuah negara republik parlementer sehingga di tahun 1950 di bentuk Undang Undang Sementara guna menyokong sistem Parleментар yang telah berjalan (Kurniawan 2016).

Kemudian di tahun 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang berisi pembubaran konstituante dan tidak berlakunya UUDS 1950 serta di bentuknya MPRS

dan DPAS, konsepsi Presiden Soekarno ini di sebut dengan *penemuan Kembali jalan revolusi Indonesia* dan di mulainya era Demokrasi Terpimpin.

Robohnya demokrasi terpimpin di akibatkan kondisi politik di tahun 60 an sempat membawa harapan baru bahwa demokrasi akan menjadi lebih baik, pengangkatan Soeharto menjadi Presiden di tahun 1967 menandai di mulainya demokrasi Pancasila yang di motori oleh orde baru, demokrasi pada masa ini haruslah di bangun berdasarkan kaidah kaidah dalam Pancasila dan UUD 1945.

Krisis moneter yang terjadi di tahun 1998 dan banyaknya Praktik KKN, Krisis ekonomi, bencana, alam dan berbagai gerakan yang dimotori mahasiswa dan berbagai faktor lain akhirnya berhasil merobohkan Presiden Soeharto. Peristiwa ini membuat nya terpaksa turun dari jabatan Presiden dan di gantikan oleh wakil Presiden yang di jabat oleh B.J Habibie. Setelah 32 tahun berkuasa Orde Baru pun hilang pesonanya di gantikan dengan zaman Reformasi. Di era ini demokrasi mulai mendapat nafas baru dan kebebasan berpendapat dapat di rasakan oleh semua warga negara.

Uraian diatas menyimpulkan bahwa Indonesia beberapa kali mencoba sistem demokrasi seperti demokrasi parlementer (1945-1959), era Demokrasi Terpimpin (tahun 1959-1966), era Orde Baru (1966-1998) dan era Reformasi (1998-Sekarang) (Windu, 2019).

Tantangan Demokrasi

Terdapat beberapa tantangan dalam sistem demokrasi, tantangan ini pula yang di duga membuat Indonesia berulang kali berganti sistem demokrasi mulai demokrasi parlementer hingga zaman reformasi saat ini, Adapun tantangan tantangan itu antara lain:

1. Korupsi

Korupsi memberikan dampak negatif yang sangat signifikan dalam negara demokrasi, korupsi dapat mengganggu stabilitas negara, merusak prinsip akuntabilitas dan transparansi yang selalu di tekankan dalam sistem demokrasi, korupsi juga menyebabkan terhambatnya partisipasi politik yang merata, salah satu motif korupsi adalah mempengaruhi pemilihan umum dengan cara memanipulasi proses pemilihan. Hal ini jelas membahayakan stabilitas demokrasi di sebuah negara (Alifa, 2023).

2. Populisme

Populisme adalah gaya politik yang mengklaim mewakili suara rakyat melawan "elit" atau "establishment". Populisme dapat mempengaruhi proses demokrasi dan keseimbangan kekuasaan secara kompleks, populisme mengabaikan prinsip Pluralisme, perlindungan hak minoritas, dan keseimbangan kekuasaan antara Lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif yang selalu di tekankan dalam sistem negara demokrasi.

3. Ketimpangan ekonomi

Ketimpangan ekonomi sangat memberikan dampak yang signifikan terhadap laju demokrasi di sebuah negara, ketimpangan ekonomi memiliki implikasi terhadap stabilitas demokrasi dan partisipasi politik Masyarakat, ketimpangan ekonomi yang

tinggi dapat menyebabkan ketidakadilan baik dalam aspek sosial ataupun aspek perekonomian Masyarakat. Ketimpangan ekonomi juga memicu ketidakpuasan terhadap sistem politik dan Lembaga Lembaga yang terbentuk berdasarkan sistem demokrasi (Alifa, 2023).

Kesimpulan dan Saran

Demokrasi adalah persamaan hak-hak sesama manusia, sebuah sistem yang berpandangan bahwa semua manusia sama di depan hukum. Maka dari hal ini muncullah beberapa Idiom seperti Egalite (Persamaan), Equality (Keadilan), dan lain sebagainya. Demokrasi merupakan sebuah struktur pemerintahan yang diterapkan pertama kali di kota Athena di zaman Yunani kuno, konsep tersebut sempat terkubur saat bangsa Eropa memasuki zaman kegelapan dan mulai dijalankan Kembali Ketika zaman kegelapan tersebut berakhir.

Sekelompok pemuda Indonesia yang belajar di Eropa berusaha “mencuri” ide demokrasi dan membawanya ke tanah kelahirannya demi mewujudkan kebebasan di tanah kelahiran mereka, kondisi awal kemerdekaan yang belum kondusif menyebabkan bangsa Indonesia berulang kali berganti sistem demokrasi mulai dari sistem demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan demokrasi lainnya. Dalam Islam juga terdapat beberapa prinsip yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi seperti kesamaan, kebebasan dan lain sebagainya sehingga dapat di selaraskan dalam berbangsa dan bernegara.

Daftar Pustaka

- Alifa, U., Ridho, M., Barri, M. F., & Akbari I. S. (2023). Demokrasi: Tinjauan terhadap konsep, tantangan, dan masa depan. *ADVANCES in Social Humanities Research*, 1 (4), 435–44. <https://www.adshr.org/index.php/vo/article/view/48>
- Kurniawan, Dhani. (2016). Demokrasi Indonesia dalam lintasan sejarah yang nyata dan yang seharusnya. *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8 (1), 94–111. <https://doi.org/10.21831/moz.v8i1.10770>.
- Ni'mah, Z. A., Fahrudin, M.M., Jamal., & Oktavia, N. (2023). *Dinamika sejarah peradaban Islam*. Malang: Pustaka Peradaban.
- Razi, Fakhruddin Ar. (1981). *Mafatih Al Ghaib Jilid VIII*. Beirut: Dar-Al Fikr Lebanon.
- Ujaili, Sulaiman bin Umar Al. (2018). *Al Futuhat Al Islamiyyah Jilid VII*. 5th ed. Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiyah-Beirut.
- Windu, Bambang Agus. (2019). Dinamika demokrasi di Indonesia. *Mimbar Administrasi*, 15 (19).
- Zainuddin, M. (2022). Telaah implementasi demokrasi di negara muslim. *Ulul Albab*, 4 (2), 73–87.
- Zainuddin, M. (2016). *Filsafat elektika Islam*. Yogyakarta: Naila Pustaka.